

PENELITIAN INDUSTRI FARMASI DI INDONESIA

ABSTRAK

Industri farmasi merupakan industri yang sangat vital bagi suatu negara dan juga bagi kelangsungan hidup masyarakat di suatu negara. Mengingat pentingnya industri Farmasi bagi Indonesia, maka di tahun 2019 KPPU mengadakan penelitian bersama dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur pasar, rantai pasok, dan pola harga di industri farmasi sehingga dapat menganalisis industri farmasi secara komprehensif. Selain itu juga dianalisis potensi anti persaingan sehat, atau dengan kata lain disinyalir berpotensi kartel, yang terjadi di industri ini.

Dari penelitian ini terlihat bahwa peran negara di dalam industri farmasi masih tampak terbatas. Berbagai peta jalan (*roadmap*) sudah dibuat namun masih belum bisa diterapkan sepenuhnya. Hal lain yang dapat dicatat adalah ketersediaan data terkait industri farmasi yang masih minim dan sulit diakses oleh umum. Untuk itu, peran BPS masih perlu ditingkatkan misalnya saja dengan mengadakan survei rantai pasok industri farmasi yang hingga kini belum tersedia datanya.

Dalam industri farmasi ini, ada sekitar 208 perusahaan (data kemenperin, 2018) dan 276 (data BPS, 2017). Dari sisi perusahaan, ada tiga jenis perusahaan yaitu BUMN, swasta domestik dan multinasional. Industri Farmasi di Indonesia terkonsentrasi. Data memperlihatkan HHI indeks 5200 yang menunjukkan konsentrasi pasar yang cukup tinggi.

Dari perspektif rantai pasok, perilaku perusahaan farmasi dapat dibagi menjadi dua yaitu pertama, melakukan integrasi vertikal ke depan yang bertujuan untuk memperbesar *marketing size* dan kedua, perusahaan juga melakukan integrasi vertikal ke belakang dengan pemasok yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas pasokan. Selain itu, perusahaan juga melakukan integrasi horizontal dengan mengakuisisi perusahaan lain misalnya yang lebih kuat di pemasarannya.

Sampai saat ini, arah pengembangan industri hulu yaitu petrokimia dan intermediasi belum cukup konkrit. Belum banyak perusahaan yang berorientasi kepada pembangunan industri farmasi hulu terutama industri intermediasi karena skala ekonomi yang ada di Indonesia dianggap lebih kecil dan kurang efisien dibandingkan dengan negara lain misalnya Cina dan India. Sementara itu banyak negara lain yang lebih kecil dibandingkan Indonesia, misalnya negara-negara maju, mereka memiliki industri farmasi yang skala ekonominya tercapai sehingga mampu memproduksi obat-obatan lebih efisien.

Peran negara untuk mempengaruhi harga masih terbatas. Hingga kini peranan LKPP hanya terbatas dari sisi transparansi, yaitu ketika program e-catalog diterapkan. Selain itu

hubungan negara terbatas pada proses negosiasi, yakni sebelum harga masuk di e-catalog ataupun formularium nasional (fornas). Sesudah program E-catalog diterapkan, penerapan harga menjadi lebih transparan karena publik bisa mengakses dan membandingkan harga secara resmi.

Pasca penerapan program JKN, rumah sakit dan dokter menerapkan resep dengan pengawasan BPJS sehingga peresepan obat menjadi lebih efisien. Selain itu, jumlah permintaan obat mengalami peningkatan seiring peningkatan jumlah pasien yang berobat. Akibatnya harga cenderung stabil tetapi volume penjualan semakin banyak.